

IMPLEMENTASI MULTI-TRACK DIPLOMACY DALAM EU-SOUTH AFRICA STRATEGIC PARTNERSHIP TAHUN 2016-2020

Rei Antonio Juniantoro

Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Email: 372018009@student.uksw.edu

Triesanto Romulo Simanjuntak

Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Email: triesanto.simanjuntak@uksw.edu

Roberto Octavianus Cornelis Seba

Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Email: robert.seba@uksw.edu

ABSTRAK

EU-South Africa Strategic Partnership merupakan sebuah kerangka kerjasama yang berperan sebagai *master plan* relasi kerjasama multilateral antara Afrika Selatan dan Uni Eropa yang berfokus pada pembangunan jangka panjang dan transformasi sosio-ekonomi di Afrika Selatan dalam masa *post-apartheid*. Afrika Selatan menjalani proses perkembangan dalam berbagai sektor, diantaranya pemerintahan, ekonomi, dan kemanusiaan sekaligus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan globalisasi dan tatanan dunia baru. Melalui metode penelitian kualitatif dan analisa studi kasus, diketahui bahwa dalam proses *strategic partnership*, Uni Eropa yang berperan sebagai *role model* menegaskan pentingnya *joint effort* antara pemerintah, NGO, dan masyarakat untuk mewujudkan transformasi sosio-ekonomi bagi Afrika Selatan, sebuah perubahan politik, ekonomi, dan kemanusiaan secara nasional yang kemudian akan berpengaruh pada kebijakan luar negeri dan peran negara tersebut sebagai aktor dalam komunitas internasional. Kemunculan isu-isu baru yang berkembang diluar aspek keamanan dan politik semakin meningkatkan relevansi aktor NGO dan organisasi internasional, termasuk kajian perspektif baru seperti *multi-track diplomacy* yang berkaitan dengan proses diplomasi yang semakin bervariasi dalam hubungan internasional yang dapat dikategorikan dalam *tracks* atau jalur yang baru diluar aspek politik dengan keterbatasan peran pemerintah.

Kata kunci: *Uni Eropa, Afrika Selatan, multi-track diplomacy, strategic partnership*.

ABSTRACT

The EU-South Africa Strategic Partnership is a cooperation framework that acts as a master plan for multilateral cooperation relations between South Africa and the European Union that focuses on long-term development and socio-economic transformation in South Africa in the

post-apartheid era. South Africa is undergoing a process of development in various sectors, including government, economy, and humanity as well as trying to adapt to globalization and the new world order. Through qualitative research methods and case study analysis, it is known that in the strategic partnership process, the European Union which acts as a role model emphasizes the importance of joint efforts between the government, NGOs, and the community to realize socio-economic transformation for South Africa, a change in politics, economy, and humanity nationally which will then influence foreign policy and the country's role as an actor in the international community. The emergence of new issues that develop outside of security and political aspects further increases the relevance of NGO actors and international organizations, including studies of new perspectives such as multi-track diplomacy related to diplomatic processes that are increasingly varied in international relations which can be categorized in new tracks or pathways. outside the political aspect with the limited role of government.

Keywords: European Union, South Africa, multi-track diplomacy, strategic partnership.

PENDAHULUAN

Sebagai kekuatan ekonomi dan organisasi regional terbesar di kawasan Eropa, aktivitas perekonomian Uni Eropa tidak berhenti pada pembangunan dalam negara anggotanya saja, namun juga berinvestasi pada proyek-proyek kerjasama dengan negara negara lain di luar kawasan. Berfokus pada bagaimana Uni Eropa sebagai aktor global membangun hubungan dan berdiplomasi dengan negara lain, Uni Eropa secara keseluruhan merupakan organisasi yang menggunakan berbagai macam bentuk diplomasi secara fleksibel, terutama menjalin kerjasama melalui berbagai aspek keunggulan yang mereka miliki sebagai sebuah organisasi yang berpengaruh di kawasannya. Salah satu bentuk kerjasama yang mereka lakukan di luar kawasan adalah *Pan African Programme* atau yang dikenal sebagai *EU-AU Partnership* yang mulai diinisiasikan sejak tahun 2014 dan melibatkan negara negara anggota Uni Eropa dan *African Union*, merupakan salah satu strategi Uni Eropa dalam memperluas jangkauan mereka keluar kawasan Eropa dengan memanfaatkan hubungan tersebut sebagai bentuk diplomasi Uni Eropa terhadap negara negara yang terlibat. Negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut meliputi negara-negara yang direpresentasikan oleh *African Union*, meskipun begitu, Uni Eropa lebih lanjut memperdalam kerjasama tersebut kepada masing masing negara secara khusus, salah satunya adalah Afrika Selatan melalui SADC EPA atau *Economic partnership Agreement* yang melibatkan *EU Chamber of Commerce in South Africa* sebagai organisasi non-profit yang mewakili

pelaku ekonomi EU di Afrika Selatan. Afrika Selatan menjadi salah satu negara tujuan kerjasama Uni Eropa dengan pertimbangan investasi dalam bentuk usaha ekonomi industri yang melibatkan hingga 2.000 perusahaan dan 300.000 tenaga kerja. Dengan total populasi mencapai 56.78.635 jiwa pada tahun 2021 ditambah dengan SDM yang dapat menghasilkan banyak tenaga kerja melihat rentang usia masyarakat Afrika Selatan yang 75% masih berada dibawah 55 tahun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 (Bhorat dkk., 2014). Kerjasama yang melibatkan begitu banyak perusahaan dari Uni Eropa membutuhkan tenaga kerja berkualitas sebagai bentuk investasi jangka panjang.

Berdasarkan penelitian Anna Zygierewicz dalam *EU-Africa Academic Cooperation* tersebut Afrika Selatan memiliki ketersediaan SDM yang cukup tinggi, namun kapasitas ketenagakerjaan Afrika Selatan sendiri belum dapat menyerap jumlah tersebut secara optimal. Hal itu berkaitan dengan kualitas tenaga kerja di Afrika Selatan yang masih terikat pada bidang agrikultur dan jasa sehingga penyerapan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat industrialisasi penuh belum dapat tercapai. Teknologi merupakan hal yang penting bagi ekonomi begitu juga dengan SDM masyarakat sebuah negara untuk memperbaiki kapasitas ekonomi secara merata (Rodrik, 2008). Sedangkan dalam penelitian *Economic Policy in South Africa Past, Present, and Future* oleh Haroon Bhorat dan Alan Hirsch, meskipun Afrika Selatan merupakan negara dengan populasi siap kerja yang sangat tinggi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kuantitas tersebut tidak berarti jika dihadapkan dengan kebijakan ekonomi dan kualitas SDM yang masih perlu diperbaiki. Dalam kerjasama yang dilakukan antara Uni Eropa dengan Afrika Selatan, fokus pembenahan dalam bidang ekonomi dan SDM dalam agenda utama mereka membuktikan bahwa negara tersebut sangat bergantung pada dukungan dari Uni Eropa yang dalam hal ini bertindak sebagai role model bagi pemerintah dan masyarakat Afrika Selatan untuk mengarahkan negara tersebut kepada perubahan yang sifatnya struktural dan mendasar. Pola perubahan struktural terhadap SDM, terutama pendidikan membantu menjelaskan permasalahan utama di Afrika Selatan dimana kebijakan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dihambat oleh *skill shortage*. Pada dasarnya, Afrika Selatan merupakan negara yang sangat berpengaruh sebagai pelopor perkembangan bagi

komunitas negara di Afrika bagian selatan, terutama dalam hubungannya dengan SADC-EPA dan pelaku bisnis asal Uni Eropa yang terus menerus berinvestasi serta mengupayakan perubahan struktural bagi ekonomi Afrika Selatan, yang diharapkan dapat diimplementasikan pada negara lain di benua Afrika (Potgieter dkk., 2020).

Uni Eropa memiliki prioritas untuk mencapai hasil kerjasama jangka panjang dalam kerjasamanya dengan Afrika Selatan demi menghindari hasil short-term yang tidak sustainable. Namun meskipun begitu, kerangka kerjasama untuk mewujudkan hasil tersebut tidak dapat direalisasikan begitu saja mengingat kondisi keseluruhan di Afrika Selatan sebagai negara yang berkembang pesat namun tidak memiliki aset yang diperlukan untuk mendukung kesejahteraan jangka panjang. Maka dari itu berbagai proses yang bersifat jangka pendek dengan kurun waktu lima sampai dengan sepuluh tahun harus tercapai lebih dahulu sebagai bagian untuk mempersiapkan Afrika Selatan dalam memanfaatkan kerangka kerjasama dengan Uni Eropa secara maksimal. Untuk waktu mendatang, relasi antara Afrika Selatan dan Uni Eropa sekaligus pihak NGO yang terlibat dapat membuahkan hasil sebagai dasar untuk melanjutkan kerjasama tersebut ke tahap yang lebih jauh sekaligus membuktikan kesiapan dan komitmen Afrika Selatan, baik pemerintah maupun masyarakatnya, untuk mencapai hasil yang dapat dirasakan oleh semua pihak. Secara khusus, keberhasilan kerjasama multisektor melalui multi track diplomacy sangat bergantung pada pihak selain pemerintah terutama masyarakat. Pemerintah Afrika Selatan dalam studi kasus ini masih memegang peranan yang penting sebagai *regulator* utama dan membuka jalan bagi Uni Eropa untuk menjangkau sektor lain yang tidak atau belum sepenuhnya dapat dijalankan secara efektif oleh pemerintah, sehingga koordinasi antara pihak yang terlibat menjadi kunci utama keberhasilan dari seluruh kerangka kerjasama yang tergabung dalam Pan African Programme.

European Union - South African strategic partnership pada dasarnya tidak terbatas pada kepentingan politik saja, namun mencakup hal yang lebih luas dan aspek-aspek yang sebelumnya dianggap tidak signifikan dalam diplomasi dan peacebuilding. Konsep multisektor yang terangkum dalam *multi track diplomacy* mampu memposisikan peran ekonomi, agama, pendidikan, budaya, dan kemanusiaan disamping fungsi politik sehingga pembentukan relasi antar aktor hubungan

internasional dapat dijalin melalui kepentingan yang berbeda dan tidak terpaku pada relevansi politik. Melihat secara keseluruhan, *Pan African Programme* sebagai *master plan* maupun *EU-South Africa Strategic Partnership* merupakan sebuah sistem kerjasama yang sangat luas dan mencakup berbagai multisektor lainnya, dan dalam kerjasama antara EU dan Afrika Selatan dilakukan dalam bidang SDM terutama program pendidikan dan pelatihan untuk mendukung terwujudnya SDG dalam bidang pendidikan dan *human development* di Afrika Selatan. Melihat hal tersebut, pendekatan yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam menjalin hubungan dengan Afrika Selatan menggunakan berbagai aspek, tidak hanya melalui ekonomi dan pemerintahan saja namun juga melalui aspek sosial. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai implementasi *multi track diplomacy* untuk melihat hubungan kerjasama antara EU dan Afrika Selatan yang bersifat multisektor sebagai sebuah strategi diplomasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Soegiyono (2005) penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti sebuah kondisi dari suatu objek dan peneliti berperan sebagai instrumen kunci, data yang didapatkan berupa penjelasan deskriptif dan pemaparan yang melibatkan narasi. Dengan menggunakan metode penelitian berbentuk kajian pustaka peneliti akan mengetahui bagaimana *Multi Track Diplomacy* diterapkan dalam hubungan kerjasama multilateral antara EU dan Afrika Selatan sebagai bagian dari SA- EU *Strategic Partnership* tahun 2016-2020. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam menganalisa kerjasama multilateral antara EU dan Afrika Selatan sebagai bagian dari SA- EU *Strategic Partnership* tahun 2016-2020 adalah jenis penelitian studi kasus. Menurut Wahyuningsih (2013), jenis penelitian studi kasus merupakan metode penelitian yang subjeknya terikat pada kurun waktu dan tempat dan melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang berkaitan.

Jika disimpulkan, studi kasus merupakan jenis penelitian dimana peneliti mengkaji suatu fenomena tertentu dalam kurun waktu dan kegiatan (program, peristiwa, atau proses) tertentu serta mengumpulkan informasi secara terinci dan

mendalam melalui pengumpulan berbagai data selama periode tertentu. Data dalam penelitian ini data didapatkan melalui jurnal, buku, laporan, dan *website* milik Uni Eropa dan pemerintah Afrika Selatan. Selain itu, pengumpulan data tambahan pendukung lainnya seperti grafik, tabel, dan hasil penelitian sebelumnya dilakukan melalui studi literatur dalam buku, jurnal, artikel, ataupun *website* milik Uni Eropa dan Trailblazer Program sebagai NGO terkait. Hasil data tersebut direduksi dan diolah untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus, kemudian dalam proses penyajian data, hasil tersebut dikaitkan dan dianalisis melalui perspektif *Multi Track Diplomacy* dan konsep kerjasama multilateral, sebelum akhirnya mampu menghasilkan kesimpulan akhir.

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Multi-Track diplomacy* sebagai sebuah pendekatan untuk melihat hubungan diplomasi antar negara dengan yang terbagi dalam sembilan *tracks* atau jalur dalam proses diplomasi. Dalam pendekatan *Multi Track Diplomacy*, peran pemerintah saja tidak cukup luas dalam menjangkau permasalahan atau fenomena yang sifatnya multisektor, sehingga perlu adanya jalur berbeda untuk mengatasi hal tersebut secara khusus. Sembilan jalur tersebut diantaranya adalah: (*Track 1*) *Government* atau pemerintah sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam sebuah negara, dan memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan, (*Track 2*) *Non-government* atau aktor non negara yang bergerak dan memiliki spesialisasi dalam bidang tertentu, (*Track 3*) *Business* atau kerjasama melalui jalur ekonomi dalam memberikan peluang kerjasama bagi pihak yang terlibat, (*Track 4*) *Private citizen* atau aktor individu yang mampu memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah atau keterlibatannya dalam organisasi, (*Track 5*) *Research, Training, and Education* atau pengembangan SDM melalui ilmu pengetahuan, pelatihan berbasis skill, dan penelitian terhadap suatu permasalahan, (*Track 6*) *Activism* atau gerakan yang dapat memberikan pengaruh dalam berbagai bidang seperti kemanusiaan dan lingkungan, (*Track 7*) *Religion* atau menjalin hubungan melalui kepercayaan dan nilai religius tertentu, (*Track 8*) *Funding* atau upaya penyelesaian masalah melalui penyediaan bantuan berupa sumber daya sebagai support utama, dan (*Track 9*) *Communications and Media* atau pemanfaatan media dan informasi sebagai sarana untuk memperluas dan memperkuat jangkauan

hubungan kerjasama.

Penelitian ini akan berfokus pada implementasi *Track 1*, *Track 3*, dan *Track 5* dalam hubungan kerjasama antara Uni Eropa dan Afrika Selatan berdasarkan keterlibatan aktor negara, organisasi regional, dan NGO, dan kerjasama multisektor yang menjangkau bidang politik, ekonomi, dan pengembangan SDM di Afrika Selatan.

HASIL DAN DISKUSI

***Pan African Programme* dan Perkembangan Relasi EU-Afrika Selatan**

Pan African Programme merupakan kerangka kerjasama yang direalisasikan pada bulan April tahun 2014 dalam EU-Africa Summits ke-4 di kota Brussels sebagai sebuah instrumen pendukung ekonomi utama (*financial instrument*) dalam hubungan multilateral antara African Union dan Uni Eropa dalam *strategic partnership* untuk menjawab kebutuhan kedua pihak terhadap banyaknya aspek yang menjadi aktivitas yang bersifat antar kawasan maupun global sebagai bagian dari DCI (*Development Cooperation Instrument*). Bersama dengan *roadmap* yang telah disepakati, agenda kerjasama jangka pendek hingga tahun 2020 meliputi lima poin yaitu keamanan dan perdamaian (poin *peace and security*), demokrasi, pemerintahan, dan HAM (poin *democracy, good governance, and human rights*), pemberdayaan manusia (poin *human development*), pembangunan berkelanjutan dan integrasi kontinental di Afrika (poin *sustainable and inclusive development and growth and continental integration*), dan isu-isu global dan lintas batas (poin *global and cross cutting issues*). Menjalankan fungsinya sebagai sebuah instrumen finansial, *Pan African Programme* memiliki *action programmes* bersifat tahunan yang diatur berdasarkan *funds* yang dimiliki (403,45 juta Euro) yang kemudian didistribusikan kepada lima program utama dalam bidang pembangunan sebanyak 42%, pemberdayaan manusia 29%, isu global sebanyak 13%, bidang pemerintahan sebanyak 12%, dan yang terakhir yaitu bidang keamanan sebanyak 4%. Terlepas dari *fund distributions* dari tiap program tersebut *Pan African Programme* juga memiliki komitmen umum dalam mitigasi dampak perubahan iklim dan upaya kesetaraan gender yang mencakup 40 % dari keseluruhan jumlah *funds* yang digunakan.

Sejarah relasi antara Uni Eropa dan Afrika Selatan pada masa *post-apartheid* mulai dilakukan sejak tahun 1994 setelah terbentuknya pemerintahan baru pada masa terpilihnya Nelson Mandela sebagai presiden baru Afrika Selatan. Hubungan awal Afrika Selatan dengan Uni Eropa yang dimulai dengan proses negosiasi pada tahun 1994. Proses tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi politik Afrika Selatan, dimana hasil dari kegiatan diplomasi tersebut berkaitan dengan kondisi pasar di negara-negara anggota Uni Eropa dan penentuan tarif perdagangan nantinya akan berpengaruh pada *stakeholder*, tingkat produksi, dan lapangan kerja di Afrika Selatan. Pergantian situasi politik di Afrika Selatan pada akhirnya juga berpengaruh pada hubungan negara tersebut dengan Uni Eropa dan membuka kesempatan untuk memperdalam kerjasama yang dimulai dari bidang ekonomi. Dengan mempertimbangkan posisi Afrika Selatan dan potensi sumber daya yang dimiliki, diputuskan bahwa isu terpenting yang harus menjadi fokus utama di Afrika Selatan adalah dialog politik, investasi swasta, integrasi regional, dan kerjasama perdagangan. Relasi yang terus berlanjut meningkatkan keterlibatan Afrika Selatan dalam berbagai perjanjian kerjasama seperti *Interim Cooperation Agreement* dan Lome Convention pada 1994, dan dilanjutkan dengan TCDA (*Trade, Co-operation and Development Agreement*) pada tahun 1999, dimana Afrika Selatan berperan untuk memfasilitasi pembangunan dan investasi asing dengan bantuan finansial dari Uni Eropa.

***Strategic Partnership* sebagai Kerjasama Multilateral antara Uni Eropa dan Afrika Selatan**

Strategic partnership merupakan sebuah bentuk hubungan kerjasama yang meliputi berbagai aspek dalam hubungan Uni Eropa dan Afrika Selatan. Bagi Afrika Selatan sebagai negara penerima bantuan, *Strategic partnership* yang telah berjalan sangat berkaitan dengan visi kebijakan luar negeri Afrika Selatan pada masa pemerintahan baru *post-apartheid*, dalam hal ini mengenai relasi multilateral dengan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya. Dibentuknya relasi tersebut merupakan salah satu bagian dari proses *re-entry* Afrika Selatan ke dalam komunitas internasional bersama dengan agenda lain seperti bergabung dengan *Non-Alignment Movement*

(Gerakan Non Blok) dan G77, dan kembalinya Afrika Selatan ke PBB. Dalam proses kembalinya Afrika Selatan ke komunitas internasional, negara tersebut mampu memperluas jangkauan diplomatik mereka dengan 78 negara sejak tahun 1994.

Disamping proses negosiasi dengan Komisi Uni Eropa sebagai kebijakan awal luar negeri Afrika Selatan, kerjasama yang bersifat *intradepartmental* atau melibatkan pihak swasta dan organisasi non-pemerintah juga menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Dengan membentuk hubungan multilateral dengan Uni Eropa sebagai organisasi regional yang menaungi sebagian besar negara-negara di Eropa, Afrika Selatan memiliki berbagai pilihan untuk melakukan kerjasama dan menerima investasi asing dari banyak negara anggota secara langsung melalui Uni Eropa tanpa harus membentuk perjanjian secara individual dengan tiap negara Eropa secara terpisah. Dalam masa *post-apartheid*, Afrika Selatan harus membenahi permasalahan domestik yang berkaitan dengan sosio-ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan SDM yang kurang dalam *skill*. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkanlah kebijakan jangka panjang yang dapat menjangkau seluruh permasalahan secara bertahap, namun dengan kemampuan Afrika Selatan yang masih sangat terbatas pada, pemerintah tidak dapat melakukan reformasi terhadap aspek sosial dan ekonomi secara merata. Berdasarkan hal tersebut, Afrika Selatan memutsukan untuk memanfaatkan relasinya dengan Uni Eropa yang telah terbentuk sejak tahun 1994 bersama dengan negara-negara kawasan Afrika bagian selatan lainnya. Terbentuknya *strategic partnership* pada tahun 2014 merupakan salah satu kebijakan luar negeri Afrika Selatan dengan menempatkan Uni Eropa sebagai *role model* untuk menjalankan kebijakan domestik pembangunan jangka panjang dan transformasi sosio-ekonomi.

Implementasi EU-SA *Strategic Partnership* melalui *Multi Track Diplomacy*.

Implementasi *strategic partnership* yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Afrika Selatan melibatkan agenda yang mencakup berbagai sektor, diantaranya adalah politik dan pemerintahan, ekonomi, dan *human development* yang masing-masing terbagi berdasarkan *goals* atau tujuan dan *roadmap* yang berbeda. Berdasarkan variasi agenda tersebut, baik Afrika Selatan maupun Uni Eropa menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menyesuaikan kebijakan yang akan diambil dalam mencapai target

strategic partnership pada tiap sektor. *Partnership* yang luas tersebut menghadirkan berbagai aktor selain pemerintah, tentunya dengan kapasitas yang berbeda dalam mengatasi permasalahan dan hambatan yang ada, terutama dalam bidang yang melibatkan ekonomi dan pemberdayaan SDM dimana keterlibatan *stakeholder* dan NGO dapat membantu pemerintah memperluas jangkauan kerjasamanya. Dalam studi kasus ini, teori *multi track diplomacy* dapat digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, termasuk bagaimana peran setiap aktor yang terlibat dalam mengurus sektor-sektor dalam *strategic partnership* yang terbagi menjadi tiga *tracks* atau jalur kerjasama yaitu *government*, *economy*, dan *human development*.

Track 1: EU & South African Government

Track yang pertama adalah *government* atau jalur diplomasi dan kerjasama yang berfokus pada keterlibatan pemerintah sebagai institusi formal kedua negara. Agenda utama dalam *strategic partnership* dalam bidang politik dan pemerintahan di Afrika Selatan adalah *good governance* dalam jangka Panjang terutama di Afrika Selatan masa *post-apartheid*. Konsep *good governance* yang ingin direalisasikan merujuk pada bagaimana pemerintah sebagai institusi utama yang memegang kebijakan dan kewenangan dalam negara mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan meningkatkan kualitas pelayanan melingkupi seluruh kelompok masyarakat. Dalam *strategic partnership* antara EU dan Afrika Selatan, pencapaian *good governance* memegang peranan yang sangat penting untuk mendasari terciptanya lingkungan yang kondusif dan mendukung bagi aktivitas ekonomi di Afrika Selatan dan menarik investasi pihak asing sehingga komitmen yang ditetapkan bagi Afrika Selatan menurut 4A (*Addis Ababa Action Agenda*) sebagai negara anggota *African Union* adalah penguatan manajemen dan pemerataan distribusi sumber daya yang berdasarkan pada sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam upaya mencapai *good governance*, diperlukan peningkatan kualitas pemerintahan yang efektif, inklusif, dan transparan dalam segala tingkat yang kemudian dapat dipertahankan melalui peran media dan masyarakat.

Implementasi *track one* dalam hal ini berperan sebagai dasar utama bagi berjalannya *track* lain dalam proses kerjasama aktor-aktor lain dalam relasi antara EU dan Afrika Selatan. Penguatan hubungan diplomatik antara institusi pemerintahan sebagai jaminan terlaksananya agenda-agenda diluar *track 1*. Dalam prosesnya, kerangka kerja *strategic partnership* antara kedua pihak merupakan hasil yang paling terlihat, yang kemudian diperkuat melalui kegiatan *EU-South Africa Summits* yang diselenggarakan pada tahun 2018 yang menghasilkan *Joint Statement* sebagai pedoman bagi hubungan politik kedua pihak. Berdasarkan *Joint Statement* sebagai produk dari diplomasi *track 1* tersebut, baik Afrika Selatan dan Uni Eropa mengambil prioritas kerjasama multilateral, bilateral, dan tingkat kawasan, diantaranya melingkupi aspek transformasi sosio-ekonomi, keamanan regional, dan pembangunan jangka panjang di Afrika Selatan seperti IR 4.0, SDGs, dan *African Union Agenda 2063*. *EU-South Africa Summits* berperan sebagai bukti komitmen terhadap perwujudan keputusan yang telah diambil secara luas oleh negara anggota Uni Eropa dan *African Union* sebagai relasi kerjasama berkelanjutan yang melibatkan pemerintah dari kedua pihak sebagai aktor utama dalam *track 1*.

Track 3: SADC EPA & EU Chamber of Commerce in South Africa

SADC EPA atau *Southern African Development Community Economic Partnership Agreement* merupakan perjanjian berbasis pembangunan dan ekonomi yang dibentuk pada tahun 2016 oleh Uni Eropa dan enam negara di Afrika bagian selatan yaitu Republik Afrika Selatan, Namibia, Botswana, Eswatini, Mozambiq, dan Lesotho sebagai bagian dari *Pan African Programme*. Proses berjalannya *track 3* dalam SA-EU *Strategic Partnership* berfokus pada Afrika Selatan sebagai negara dengan kapasitas ekonomi tertinggi diantara negara-negara Afrika lain yang terlibat dalam SADC EPA dimana dalam perjanjian tersebut Afrika Selatan memiliki kuota terbesar yaitu 83% dalam impor dan 94% dalam ekspor dengan Uni Eropa per tahun 2018. Dengan adanya implementasi SADC EPA, Afrika Selatan dan Uni Eropa dapat menentukan tingkat tarif yang diterapkan dalam perdagangan lintas batas terhadap impor yang datang dari negara-negara Uni Eropa, dimana masing-masing negara di pihak Afrika dapat menentukan sendiri perbedaan tarif sesuai dengan perjanjian SADC

EPA dan mengambil kebijakan untuk mengembangkan hubungan kerjasama dengan Uni Eropa dalam bidang jasa dan investasi. Afrika Selatan seperti halnya dengan negara Afrika lainnya dalam SADC EPA memiliki hak untuk mendapatkan akses pasar dan melakukan ekspor bebas kuota ke Uni Eropa. Implementasi dasar-dasar SADC EPA di Afrika Selatan didukung oleh bantuan dana penuh dari Uni Eropa dengan melibatkan kementerian perdagangan, industri dan agrikultur Afrika Selatan, yang kemudian diperluas dengan keterlibatan *stakeholder* dan perusahaan-perusahaan swasta baik dari Uni Eropa maupun Afrika Selatan sebagai pemegang peran kunci dalam perjanjian tersebut.

Economic goals dalam SADC EPA, yaitu meningkatkan FDI dan sektor industri diperkuat dengan adanya *EU Chamber of Commerce in South Africa* sebagai perwakilan dari perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang berada di Afrika Selatan. *Chamber of Commerce* sendiri adalah sebuah lembaga non-profit yang mewakili 20.000 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang mencapai 300.000 orang, dengan demikian, Uni Eropa menjadi sumber FDI terbesar di Afrika Selatan dengan total 75% dari seluruh investasi asing yang masuk ke negara tersebut. FDI yang masuk ke Afrika Selatan terbagi kedalam empat sektor yaitu keuangan (45%), pertambangan (20%), industri manufaktur (20%), transportasi (10%), dan sisanya dalam sektor-sektor lain. Salah satu kegiatan ekonomi industri dalam *track 3* di Afrika Selatan adalah sektor otomotif sebagai komoditas ekspor utama negara tersebut ke Uni Eropa. Afrika Selatan merupakan produsen otomotif utama di benua Afrika dengan rata-rata *output* 600.000 unit per tahunnya, dimana kenaikan ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2018 (kenaikan 23% dari tahun 2017) dengan jumlah ekspor 350.000 unit senilai empat miliar Euro, dimana 233.000 unit masuk ke pasar Uni Eropa. Terdapat tiga perusahaan dan *stakeholder* berbasis Eropa yang melakukan proses produksi di Afrika Selatan yaitu Volkswagen, BMW, dan Mercedes Benz, dimana semua perusahaan masih berada dibawah *EU Chamber of Commerce*. Kerjasama dibawah SADC EPA berfokus pada investasi yang ditanamkan oleh pihak Uni Eropa dalam industri manufaktur dan berperan untuk menarik lebih banyak FDI ke Afrika Selatan. Untuk merealisasikan *economic goals* pada *track 3* dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang dibutuhkan, perusahaan seperti BMW dan Mercedes mengimbangi investasi dengan

fasilitas pelatihan tenaga kerja pada tahun 2019. Selain FDI, *strategic partnership* melalui SADC EPA juga memberikan keringanan tarif yang sifatnya preferensial bagi *supplier* dan produsen otomotif dalam proses ekspor dan impor komoditas tersebut.

Track 5: The Trailblazer Programme and Human Development Plan

Implementasi *track 5* dalam SA-EU *Strategic Partnership* berfokus pada pencapaian *human development* untuk menunjang dan meningkatkan kualitas SDM di Afrika Selatan. Berkaitan dengan komitmen Uni Eropa dan Afrika Selatan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan *research, training, and education* sebagai pilar utama *track 5* dan pemenuhan SDG poin ke 4 (*equitable and quality education*) dan ke 8 (*sustainable economic growth and employment*), pendidikan dan pemberdayaan SDM memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan agenda-agenda *strategic partnership* secara keseluruhan dalam jangka panjang. Upaya pemberdayaan masyarakat di Afrika Selatan dalam kerjasama tersebut diwujudkan dalam *Trailblazer Programme* yang berlangsung dari tahun 2017 s.d 2019. Program tersebut melibatkan dua NGO yang bergerak dibidang pendidikan yaitu ENKE dan Operation Hope bersama dengan Uni Eropa sebagai pemasok dana yang berfokus pada pelatihan kaum muda dan pelajar. Baik ENKE maupun Operation Hope merupakan NGO yang bergerak dibidang pengembangan *skill* dan pemberdayaan ekonomi dengan tujuan utama menciptakan komunitas dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dan merata melalui *social entrepreneurship*. Dengan adanya program tersebut, hasil dan capaian yang diwujudkan dapat menempatkan generasi muda di Afrika Selatan pada posisi yang memiliki *value* berupa *softskill* dan kesadaran sosial.

Dalam prosesnya, terdapat dua tujuan utama dari Trailblazer Program, yang pertama yaitu menggerakkan generasi muda di Afrika Selatan untuk memiliki kesadaran, pemahaman, dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kondisi sosio-ekonomi. Tujuan tersebut berkaitan erat dengan kemampuan *critical thinking* terhadap isu-isu yang mempengaruhi perkembangan sosio-ekonomi Afrika Selatan secara keseluruhan. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan kapasitas *softskill* yang dibutuhkan di dunia kerja. Tujuan tersebut berkaitan dengan meningkatkan

kualitas SDM sebagai untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dapat mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi sekaligus mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Afrika Selatan. Dengan memberikan pelatihan dan edukasi di luar kurikulum sekolah, *Trailblazer Program* sebagai bentuk dari diplomasi *track 5* diharapkan mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh Afrika Selatan sebagai negara industri berkembang dengan potensi SDM yang memiliki kualitas layak kerja. Generasi muda Afrika Selatan dengan rentang umur 15-35 tahun menghadapi permasalahan pengangguran, putus sekolah, dan masalah kesehatan seperti HIV/AIDS, sedangkan di sisi pemerintah, Afrika Selatan tidak memiliki kerangka kerja untuk perencanaan generasi muda dan masih menggunakan sistem edukasi formal masa *apartheid* sehingga akhirnya menghasilkan NEET (*Not in Employment, Education, or Training*), upaya pemerintah untuk mereformasi sistem Pendidikan tidak membuahkan hasil karena institusi pendidikan hanya berfokus pada skill akademik dan tidak mendapatkan *skill* yang diperlukan untuk terlibat dalam kegiatan sosio-ekonomi.

Hasil dari *Trailblazer Program* diukur berdasarkan partisipasi kaum muda dalam pencapaian proyek sosio-ekonomi yang dibagi menjadi kategori berbeda, dimana semuanya berkaitan dengan pemberdayaan yang disesuaikan dengan transformasi sosio-ekonomi yaitu *education* (258 proyek), *environment* (77 proyek), *community development* (265 proyek), *human rights and governance* (81 proyek), dan *health risk and behaviour* (198 proyek) dengan total 879 *community action projects*. Persentase data yang diperoleh berdasarkan proyek yang terselesaikan pada tahun 2017 mencapai 84%, kemudian sempat mengalami penurunan menjadi 79% ditahun 2018 sebelum kemudian meningkat kembali menjadi 91% pada tahun 2019, jika hasil tersebut di rata-rata, total keseluruhan penyelesaian proyek mencapai 84,6% dan melebihi target pemenuhan 80%.

Gambar 1. Persentase peserta dan pencapaian program dalam *Community Action Project*

COMMUNITY ACTION PROJECT STATUS		
	% of Trailblazers who started projects	% of projects completed*
2017	84%	84%
2018	79%	70%
2019	68%	91%
Total program	77%	81%

Sumber: ENKE (2019). *The Trailblazer Program. ENKE: Make Your Mark*. European Commission & Operation Hope South Africa.

ENKE dan Operation Hope juga menetapkan standar *social impact* untuk mengetahui rasio pengaruh secara individual terhadap komunitas, hasil yang didapatkan di akhir program mencapai 1:56, artinya satu *community action project* mampu memberikan dampak bagi 56 individu lainnya. *Human development goals* melalui *trailblazer program* antara generasi muda di Afrika Selatan dan dukungan dana dari Uni Eropa dapat memperbaiki kualitas SDM dan menjadi kunci utama dalam tercapainya tujuan-tujuan pembangunan dalam *strategic partnership*.

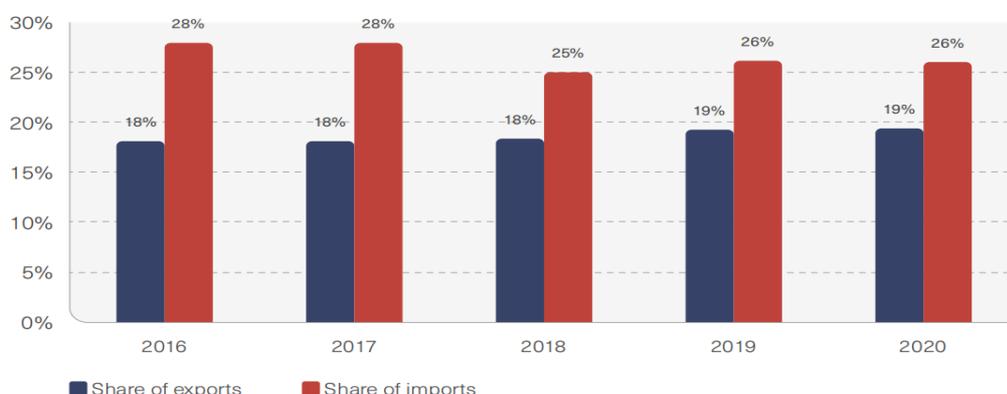
Peran *Strategic Partnership* dalam Pembangunan Sosio-Ekonomi di Afrika Selatan.

Transformasi sosio-ekonomi dan pembangunan jangka panjang di Afrika Selatan pada masa *post-apartheid* merupakan tujuan utama dari EU-SA *Strategic Partnership* dimana pada dasarnya Afrika Selatan sebagai negara berkembang mendapatkan dukungan dari pihak Uni Eropa yang juga berperan sebagai *role model* bagi pembangunan Afrika Selatan. Perubahan sosio-ekonomi merupakan *goals* yang memakan waktu, sumber daya, dan membutuhkan keterlibatan pemerintah sebagai pembuat kebijakan negara dan masyarakat sebagai kunci utama dalam mendukung realisasi pembangunan jangka panjang di Afrika Selatan. Dalam implementasi *track 1,3*, dan *5 multi track diplomacy*, *strategic partnership* merupakan *roadmap* yang menentukan arah kebijakan dan pembangunan jangka panjang di Afrika Selatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan SDM. Peran EU-SA *strategic partnership* dalam bidang *governance* di Afrika Selatan meningkatkan kesadaran terhadap isu yang

berkaitan dengan *good governance*, demokrasi, dan HAM pada masa *post-apartheid*. Perjanjian multilateral dengan Uni Eropa melalui *EU-South Africa Summits* dan *Joint Statements* sebagai hasilnya memberikan kesempatan bagi Afrika Selatan untuk terlibat lebih jauh dengan komunitas internasional sebagai aktor regional di benua Afrika dan membuka peluang terbentuknya lebih banyak hubungan dengan negara-negara di luar kawasan. Dengan adanya Uni Eropa sebagai *role model*, Afrika Selatan dapat mempersiapkan diri dalam mengambil kebijakan domestik dan luar negeri untuk menjawab tantangan yang terkait dengan globalisasi seperti IR 4.0 dan SDGs.

Selanjutnya, fungsi dan peran SADC EPA di bidang ekonomi memberikan berbagai kemudahan bagi Afrika Selatan dalam mengakses pasar dan meringankan beban aktivitas ekonomi lintas batas. Afrika Selatan sempat mengalami stagnasi dalam pertumbuhan ekonominya, yaitu dibawah 1%, meskipun keseluruhan ekspor dari SADC ke Uni Eropa merupakan yang terbesar (23,5%) pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan AS, China, dan India. Namun dengan adanya EPA dengan EU, Afrika Selatan dapat melindungi usaha-usaha kecil dan berkembang dengan mengendalikan tarif, proteksi, dan menghentikan laju impor jika dibutuhkan, sehingga dalam perkembangannya negara tersebut mampu mengikuti permintaan pasar global dan menjadi lebih kompeten. Dalam bidang ekspor, data yang didapatkan berdasarkan laporan Uni Eropa pada tahun awal tahun 2020 menunjukkan kenaikan jumlah ekspor sejak tahun 2016.

Gambar 2. Grafik ekspor-impor Afrika Selatan ke negara anggota Uni Eropa tahun 2016-2020



Sumber: European Commission (2019). *Annual Digest 2020 – SA-EU Trade under the SADC EU EPA*. EU Chamber of Commerce in South Africa.

Hal tersebut juga berkaitan dengan kegiatan perdagangan yang masuk dalam bentuk impor yang berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa ke Afrika Selatan dalam kurun waktu yang sama. Berdasarkan grafik tersebut, kapasitas ekspor Afrika Selatan mengalami kenaikan 1% dan penurunan impor sebanyak 2%.

Selain hak ekonomi eksklusif, Afrika Selatan juga mendapatkan akses untuk terlibat mengambil keputusan terhadap penyelesaian konflik dan kebijakan ekonomi yang telah dibentuk bersama dengan negara yang ikut dalam SADC EPA. *Foreign direct investment* yang masuk ke Afrika Selatan berupa industri manufaktur sektor otomotif dengan perusahaan asal Uni Eropa dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengatasi pengangguran dengan meningkatkan kapasitas ekspor Afrika Selatan.

Mengenai kualitas SDM dan pemberdayaan manusia sebagai penopang utama dari pembangunan berkelanjutan, generasi muda Afrika Selatan pada masa *post-apartheid* membutuhkan pengembangan berbasis *skill* untuk menjamin bahwa hasil-hasil dari kerjasama dalam *strategic partnership* dapat bertahan dimasa depan. Kapasitas ekonomi negara berkembang seperti Afrika Selatan sangat bergantung pada penyerapan SDM yang layak kerja dan kompeten untuk mengurangi kemiskinan. Sebagai salah satu faktor terpenting yang berhubungan dengan *track 1* dan *track 3*, human development plan dalam *Trailblazer Program* memberikan *value* terhadap generasi muda di Afrika Selatan sebagai kunci transformasi sosio-ekonomi berkelanjutan yang dibutuhkan oleh Afrika Selatan, terutama dalam komunitas masyarakat. Selain itu, pemberdayaan manusia juga dapat menjangkau isu-isu SDGs dalam *goals* ke-5 dan ke-8 seperti pemerataan pendidikan dan ekonomi yang berkelanjutan.

Jika dilihat melalui perspektif *multi track diplomacy*, ketiga unsur kerjasama dalam EU-SA *Strategic partnership* memiliki peran yang saling berhubungan terhadap keberhasilan pembangunan jangka Panjang di Afrika Selatan, dimana *track 1* berperan untuk meletakkan dasar-dasar kebijakan kerjasama, *track 3* berperan sebagai penggerak pertumbuhan dan pembangunan di Afrika Selatan, dan *track 5* berperan untuk menjamin perkembangan tersebut terus berlanjut.

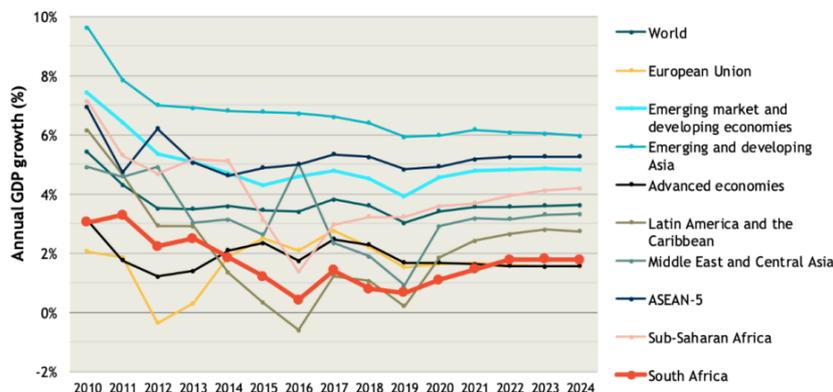
Prospek dan Hambatan dalam EU-*South Africa Strategic Partnership*

Berdasarkan proses dan hasil yang didapatkan dari implementasi *strategic partnership* tahun 2016 s.d 2020, Afrika Selatan menunjukkan kemajuan yang positif terutama jika melihat sektor industri manufaktur dan pemberdayaan manusia yang merupakan salah satu tujuan pembangunan jangka panjang Afrika Selatan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Afrika Selatan dapat berdampak pada keberlangsungan transformasi sosio-ekonomi dengan memperluas fokus *good governance* kepada isu-isu SDGs domestik lainnya seiring dengan proses globalisasi dan berkembangnya posisi negara tersebut sebagai aktor internasional. Hal tersebut berkaitan dengan manajemen sumber daya dan kesejahteraan masyarakat yang merata, tidak ada marginalisasi yang muncul dari kebijakan yang dibuat dan mencapai target yang telah ditentukan. Namun dalam perkembangannya, Afrika Selatan menghadapi hambatan dan tantangan sebagai negara berkembang baik secara internal maupun eksternal, selain itu, dinamika hubungan dengan Uni Eropa dan negara-negara di kawasan Afrika bagian selatan juga dapat mempengaruhi tujuan dan kepentingan nasional Afrika Selatan.

Secara internal, faktor-faktor yang dapat menjadi hambatan adalah pemerataan pembangunan secara menyeluruh dan dapat menjangkau masyarakat yang masih termarginalisasi pada masa post-apartheid. Dengan menghilangkan ketidaksetaraan terutama dalam akses terhadap ekonomi dan pendidikan. Selanjutnya, situasi politik, dan pergantian kekuasaan di Afrika Selatan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap relasinya dengan aktor-aktor lain, tidak hanya negara namun juga NGO yang selama ini terlibat dalam proses Kerjasama multilateral tersebut. Pengambilan keputusan oleh pemerintah yang tidak sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat mengakhiri upaya *strategic partnership* yang telah berjalan selama ini. Afrika Selatan juga harus berfokus untuk mempertahankan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk menjamin bahwa pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dan kapasitas pendapatan negara terus naik dengan mengurangi tingkat pengangguran maupun kemiskinan. Berdasarkan hasil dari proses kerjasama yang telah didapatkan dalam tahun 2016-2020, World Bank

memberikan proyeksi pertumbuhan GDP yang meningkat pada tahun 2022, dan tidak menurun hingga tahun 2024.

Gambar 3. Proyeksi pertumbuhan GDP Afrika Selatan hingga tahun 2024 dibandingkan dengan kawasan lain

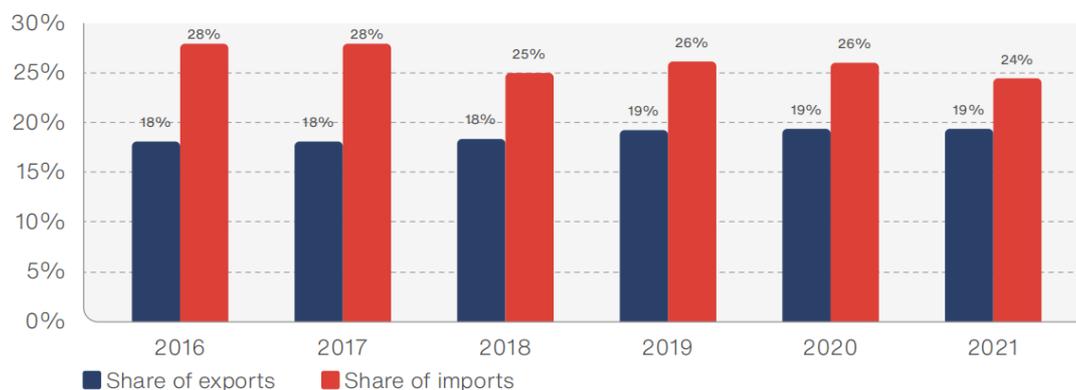


Sumber: Potgieter, J.E., Rajput, J. et al. (2020). *Circular Economy in Africa-EU: Cooperation Country Report for South Africa*. Publications Office of the European Union.

Faktor eksternal yang harus diperhatikan antara lain; persaingan di dalam kawasan dan krisis ekonomi global. SADC EPA merupakan perjanjian ekonomi yang melibatkan negara-negara di kawasan Afrika bagian selatan, sehingga dalam prosesnya, Afrika Selatan akan menghadapi persaingan untuk menarik lebih banyak FDI dari investor sekaligus mempertahankan akses terhadap pasar untuk mengimbangi kapasitas *output* produksinya. Sedangkan untuk menghadapi situasi global yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian Afrika Selatan seperti krisis pada masa pandemi Covid-19 atau kenaikan harga bahan bakar yang berdampak negatif bagi negara-negara berkembang yang bergantung pada sektor industri. Hal tersebut berkaitan dengan sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh Afrika Selatan dan *sustainable economy* mereka untuk kembali pulih.

Selain faktor internal dan eksternal tersebut, sistem ketergantungan dalam *strategic partnership* antar Afrika selatan dan Uni Eropa harus diatasi sesegera mungkin, artinya jika Afrika Selatan masih tidak dapat mandiri dalam berkembang, hal tersebut membuktikan bahwa Afrika Selatan tidak dapat memanfaatkan hubungan kerjasama dan bantuan yang diterima dengan optimal. Membahas mengenai ketergantungan ekonomi, persentase aktivitas impor dengan negara-negara anggota Uni Eropa mengalami perubahan pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan data tahun 2020, kegiatan impor mengalami penurunan sebanyak 2%.

Gambar 4. Grafik ekspor-impor Afrika Selatan ke negara anggota Uni Eropa tahun 2016-2021



Sumber: European Commission (2019). *Annual Digest 2021 – SA-EU Trade under the SADC EU EPA*. EU Chamber of Commerce in South Africa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Afrika Selatan mulai mengurangi ketergantungan impor mereka terhadap Uni Eropa secara khusus. Dengan mengurangi ketergantungan ekonomi, negara tersebut mampu membuka peluang yang lebih luas terhadap komunitas internasional maupun menjadi lebih mandiri. Berkaitan dengan salah satu target pencapaian pembangunan berkelanjutan mengharuskan Afrika Selatan memiliki manajemen ekonomi dan sumber daya yang mandiri untuk mempertahankan hasil kerjasama yang telah didapatkan bersama dengan Uni Eropa.

KESIMPULAN

Strategic partnership multisektor antara Afrika Selatan dan Uni Eropa merupakan sebuah hasil dari kebijakan luar negeri Afrika Selatan dalam bentuk Kerjasama multilateral yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan kemanusiaan khususnya pemberdayaan masyarakat. Afrika Selatan dalam masa *post-apartheid* berfokus untuk membenahi isu-isu yang berkaitan dengan *good governance*, hak asasi manusia, kesetaraan gender, ekonomi berkelanjutan, lapangan pekerjaan, kemiskinan, dan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai agenda utama yaitu transformasi sosio-ekonomi yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Melalui perspektif *multi-track diplomacy* khususnya dalam *track* pertama, ketiga, dan kelima, dapat disimpulkan bahwa berbagai proyek kerjasama yang melibatkan pemerintah, NGO, dan masyarakat dalam lingkungannya masing-masing berfungsi dalam mendukung perkembangan aspek-

aspek kunci untuk merealisasikan transformasi sosio-ekonomi di Afrika Selatan. Isu-isu yang muncul seiring dengan globalisasi dan tatanan dunia baru pada kenyataannya saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga penyelesaian terhadap permasalahan tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu menopang Afrika Selatan sebagai *developing country* karena realisasi transformasi sosio-ekonomi di Afrika Selatan perlu didukung dengan adanya dasar yang kuat dan berkelanjutan.

Strategic partnership dengan Uni Eropa menyesuaikan pada kebutuhan dan potensi Afrika Selatan, dalam bidang ekonomi yaitu sektor industri manufaktur otomotif sebagai salah satu komoditas ekspor terbesar Afrika Selatan dengan negara-negara anggota Uni Eropa dan upaya meningkatkan kualitas SDM di negara tersebut dalam bidang *human development*. *Strategic partnership* bersama Uni Eropa merupakan sebuah proses yang berpengaruh pada masyarakat dan pemerintah Afrika Selatan secara keseluruhan dan setiap sektor yang dalam lingkup kerjasama tersebut memiliki fungsi tersendiri, untuk menjamin bahwa manfaat yang didapatkan dari *strategic partnership* tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang dan mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dimasa depan. Sebagai penutup, pemahaman mengenai perspektif *multi-track diplomacy* kerjasama dan pembangunan berkelanjutan perlu menjadi pertimbangan mengingat bahwa *multi-track diplomacy* merupakan perspektif yang sangat luas, menjangkau multisektor dan melibatkan berbagai aktor, sehingga penerapannya relevan dengan isu-isu global. Bagi rekan-rekan studi hubungan internasional, penelitian lebih mendalam mengenai aplikasi *track* lain dalam *multi track diplomacy* terhadap berbagai studi kasus dapat terus dilakukan untuk memahami lebih baik bagaimana kerjasama dan relasi antara aktor hubungan internasional ditentukan oleh perkembangan dalam tatanan dunia baru.

DAFTAR PUSTAKA

BOOKS

- Rodrik, Dani (2008). *Understanding South Africa's Economic Puzzles. Economics of Transition*. Volume 16(4) 2008, 769–797. Blackwell Publishing Ltd.
- Berger, Iris (2009). *South Africa in World History*. Oxford University Press, USA.
- Clark, Nancy. L & Worger, William H. (2013). *South Africa: The Rise and Fall of Apartheid*. 2nd Edition, Routledge.

Sonneborn, Liz (2010). *The End of Apartheid in South Africa: Milestones in Modern World History*. Chelsea House Publishing.

JOURNALS

Draper, Peter (2007). *EU-Africa Trade Relations: The Political Economy of Economic Partnership Agreements*. Jan Tumlrir Policy Essays, No. 02/2007.

McDonald, John W. (2012). *The Institute for Multi-Track Diplomacy*. *Journal of Conflictology*, Volume 3, Issue 2.

Masters, Lesley (2016). *South Africa's Two Tracks Approach to Science Diplomacy*. *Journal for Contemporary History* 41(1): 169-168.

Gbemisola, Animasawun (2014). *Managing Fault Lines in Nigeria's Protracted Conflicts: The Inevitability of Multi-Track Diplomacy in the Jos Crises*. *Ibadan Journal of the Social Sciences* Volume 12 (1).

Ywason, Robert. M (2017). *Leadership Development in South Africa*. Quinnipiac University, Hamden, USA

Azunna, Chigozie, Botchway, Sam, et al. (2021). *Youth Volunteering for Development in South Africa*. *African Sociological Review*, Vol 25 (2).

Dzomonda, Obey (2020). *Social Entrepreneurship and Sustainable Development in South Africa*. *Journal of Reviews on Global Economics*, 9 (274-281)

Akinboade, Oludele A., Kinfack, Emilie C., (2015). *Financial Development, Economic Growth and Millennium Development Goals in South Africa*. *International Journal of Social Economics*

REPORTS

European Commission (2019). *Annual Digest 2019 – SA-EU Trade under the SADC EU EPA*. *EU Chamber of Commerce in South Africa*.

European Commission (2019). *Annual Digest 2020 – SA-EU Trade under the SADC EU EPA*. *EU Chamber of Commerce in South Africa*.

European Commission (2019). *Annual Digest 2021 – SA-EU Trade under the SADC EU EPA*. *EU Chamber of Commerce in South Africa*.

European Commission (2019). *Trailblazer Program: Annex VI-Final Narrative Report*. ENKE: Make Your Mark, European Commission, & Operation Hope South Africa.

FFG (2017). *International Cooperation in Horizon 2020: EU and South Africa*.

RESEARCH REPORTS

Department for International Development (2007). *An Evaluation of DFID Funded Technical Cooperation for Economic Management in Sub-Saharan Africa: Synthesis Report*. Oxford Policy Management.

Fioramonti, Lorenzo (2006). *The European Union Promoting Democracy in South Africa: Strengths and Weaknesses*. *Development Studies Association*.

Fioramonti, Lorenzo (2009). *African Perceptions of the European Union: Assessing the*

- Work of the EU in the Field of Democracy Promotion and Peacekeeping.*
International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Nkohla, Tumi V. (2014). *The Impact of Education on Economic Growth in South Africa: Econometric Analysis.* Stellenbosch University.
- Strategy& (2021). *South Africa's Economic Outlook: What can Budget 2021 Do to Help?* PWC.
- Zamfir, Ionel (2017). *EU Support to Democracy and Good Governance in Africa.* European Parliamentary Research Service.
- Zygierewicz, Anna (2018). *EU-Africa Academic Cooperation.* European Parliamentary Research Service.

OFFICIAL PUBLICATIONS

- ENKE (2019). *The Trailblazer Program.* ENKE: Make Your Mark, European Commission, & Operation Hope South Africa.
- European Commission (2020). *EU-Southern African Development Community (SADC) Economic Partnership Agreement: Creating Opportunities for EU and African Businesses.*
- European Commission (2020). *Putting Partnerships into Practice: EU Trade and Investment with African, Caribbean and Pacific States – 2020 Edition.* Publications Office of the European Union.
- Government of South Africa (2009). *Human Resource Development Strategy for South Africa (HRD-SA) 2010-2030.*
- Potgieter, J.E., Rajput, J. et al. (2020). *Circular Economy in Africa-EU: Cooperation Country Report for South Africa.* Publications Office of the European Union.
- Sithole, Phila (2021). *Direction 4IR - South Africa's Readiness and Road Map.* EU Chamber of Commerce in South Africa.

WORKING PAPERS

- Bhorat, Haroon & Hirsch, Alan (2014). *Economic Policy in South Africa: Past, Present, and Future.* DPRU Working Paper 201401. University of Cape Town.
- Konstantinos, Margaritis (2012). *An Outline of the Europe - South Africa Relations During and Post the Apartheid Era.* CES Working Papers IV, Maret 2012.
- Letebele, Beni (2020). *The Potential Contribution of EU Business in the Value Chains for Wool, Mohair and Cotton in South Africa.* EU Draft Position Paper.